

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUNJUNGAN WISATA CANDI
MUARA TAKUS KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
SELAMA COVID-19**

Oleh : Lisa Nurmaya
Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si
Email : Nurmayalisa12@gmail.com
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Muara Takus Temple is one of the leading tourist attractions in Riau Province in Kampar Regency, because it is the only historical heritage site in the form of a temple in Riau. The purpose of this research is to find out the local government's strategy for tourist visits to the Muara Takus temple, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency during Covid-19. Then to find out the inhibiting factors of the local government's strategy for tourist visits to the Muara Takus temple, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency during Covid-19.

The theory used in this research is strategic management theory according to Fred R. David. This type of research used is qualitative. While the research approach used is descriptive. Data were collected by the authors using interview and documentation techniques. The data used are primary data obtained from research informants and further supported by secondary data obtained from various government agencies related to this research.

The results showed that there were three strategies in developing the Muara Takus Temple tourist attraction, namely forming a strategy for developing the Muara Takus Temple tourist object, implementing the Muara Takus Temple tourist attraction development strategy, and evaluating the development strategy for the development of the Muara Takus Temple tourist attraction. The inhibiting factors for the Tourism and Culture Office's strategy are the lack of public participation and awareness and budget constraints in developing the Muara Takus Temple tourist object, the lack of supporting facilities and infrastructure, and the lack of interest from investors to invest.

Keywords: *Strategy, Tourism Object, Muara Takus Temple*

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*Endogenous Development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Sesuai dengan adanya peraturan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, setelah dari Undang-undang tersebut terbit Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah* yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas yang berlaku dan tugas pembantuan.¹

Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terjadinya perubahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatkan peran serta masyarakat. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* pasal 65 ayat 2 poin diterangkan bagaimana kewenangan pemerintahan daerah terhadap pengelolaan daerah dan khususnya pariwisata yakni yang berbunyi : *Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;*²

Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* menyebutkan bahwa urusan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dimana urusan Pemerintahan Pilihan termasuk di dalamnya adalah Pariwisata.

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta mendapatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang merupakan dasar hukum dan dasar dalam pertimbangan dalam menyusun program pembangunan daerah sektor pariwisata. Dengan tujuan khususnya adalah memberikan arahan agar upaya pengembangan kepariwisataan dapat menjadi sektor andalan bagi Daerah Riau, sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat baik ekonomi maupun sosial budaya. Peraturan Daerah memberikan kesempatan change untuk pengembangan objek wisata Candi Muara Takus.⁴

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh dan merata sehingga perlu adanya pembinaan yang terarah dan terkoordinir. Di samping itu, konsep pariwisata mencakup tentang upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai kegiatan dan jenis usaha pariwisata dalam meningkatkan hubungan dengan

³ Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang pariwisata

⁴ Siska "Analisis Pengembamgan Objek Wisata Candi Muara Takus Sebagai Wisata Budaya di Kabupaten Kampar" (Skripsi UIN Suska Riau, 2018).

¹ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012)

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata.

Pariwisata merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang berkaitan dengan cara penggunaan waktu luang atau waktu libur yang dimiliki seseorang. Selain itu juga pariwisata atau rekreasi telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat saat ini, dengan berpariwisata dapat berkumpul dengan menghabiskan waktu dengan sanak saudara atau orang yang disayangi untuk menambah wawasan pengetahuan pada anak atau hanya sekedar penghilang penat dari kesibukan pekerjaan yang ditekuninya.⁵

Pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara. Kepariwisata sebagai bagian dari pembangunan ekonomi mempunyai tujuan untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, yang dimaksud kesejahteraan ialah keadaan aman, sentosa, makmur. Sehingga arti kesejahteraan adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tenteram baik lahir maupun batin. Mengingat pentingnya pembangunan dibidang kepariwisataan tersebut, maka penyelenggaraan kepariwisataan harus berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan.⁶

Kabupaten Kampar adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Provinsi Riau yang memiliki berbagai potensi yang menarik, mulai dari wisata alam, budaya,

sejarah, dan lain sebagainya. Kabupaten Kampar beribu kota Bangkinang, di kenal dengan julukan Serambi Mekkah Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26 % dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk 688.204 jiwa. Kabupaten Kampar memiliki potensi wisata yang besar.

Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Destinasi Wisata⁷ adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Objek Pariwisata
2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
3. Pengembangan jenis dan paket wisata
4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program destinasi pemasaran/promosi pariwisata
6. Pengembangan Daerah tujuan wisata
7. Pengembangan Sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata.

Candi Muara Takus adalah salah satu objek wisata unggulan Provinsi Riau di Kabupaten Kampar, karena merupakan satu-satunya situs peninggalan sejarah yang berbentuk candi di Riau. Dalam hal ini candi muara Takus merupakan aset dari kabupaten Kampar dan dikelola langsung oleh Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, dalam hal ini Dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kampar mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar juga dalam hal ini termasuk kewenangan dari Kabupaten Kampar, yakni adalah lebih rincinya tertuang pada bagian

⁵ Dewi Tradena "Pengaruh Industri Pariwisata terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2016)

⁶ Bagyono, Pariwisata dan Perhotelan (Bandung :Alfabeta, 2014)

⁷ Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tahun 2017-2022

pengembangan pariwisata yang menyebutkan bahwa bidang pengembangan destinasi wisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan sumber daya wisata, alam dan budaya.

Dari beberapa strategi pengembangan pariwisata yang telah direncanakan, ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk mencapai tujuan yaitu:

1. Program Pengembangan Destinasi Wisata
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan

Berdasarkan data mengenai jumlah pengunjung atau wisatawan yang datang berkunjung ke Objek Wisata Candi Muara Takus sepanjang tahun 2020-2021, dapat diketahui bahwa pada awal tahun pengunjung cukup banyak dan di tandai dengan adanya Turis dari mancanegara yang turut datang dan juga melaksanakan Event, namun setelah memasuki bulan Mei, para pengunjung turun drastis yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan juga aturan PSBB. Secara umum mulai Juli 2020 sampai akhir 2021 hampir semua daerah di Provinsi Riau menerapkan PSBB, termasuk kawasan wisata Candi Muara Takus.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Adapun rendahnya kepercayaan wisatawan menjadi salah satu penyebabnya. Pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak main-main, sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi April 2020.

Berdasarkan LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2021, diketahui bahwa

dalam mengembangkan kawasan pariwisata di Kabupaten Kampar ditetapkan beberapa program yaitu program pemasaran pariwisata, program peningkatan daya tarik destinasi wisata, dan program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif. Akan tetapi indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan pada pengembangan destinasi pariwisata persentase hanya 20% yang terealisasi, dan pada indikator meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata persentasenya hanya 10% dari yang terealisasi dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan atau program pengembangan pemasaran pariwisata di Kabupaten Kampar.

Dimana kesemua program yang ada tingkat realisasinya tidak ada yang mencapai angka 100%. Ini menandakan bahwa dalam upaya mengembangkan destinasi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Kampar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih menemui kendala atau hambatan yang ditandai dengan tidak tercapainya realisasi 100% dari semua program yang dijalankan.

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pariwisata juga salah satu sektor yang paling pesat pertumbuhannya. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *World Travel and Tourism Council* (WTTC), pada tahun 2010 sektor pariwisata mempekerjakan kurang lebih 235 juta orang di seluruh dunia serta berkontribusi sebesar 9,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) global. Di Indonesia, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 9,1 persen dari PDB dan secara langsung dan tidak langsung

mempekerjakan lebih kurang 8,9 juta orang (*multiplier effect*).⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Pandemi covid-19 menyebabkan masyarakat dilarang untuk pergi keluar rumah untuk tujuan wisata, sehingga jumlah kunjungan wisata di Candi Muara Takus menjadi berkurang.
2. Belum maksimalnya kerjasama antara pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan masyarakat dalam pengelolaan objek pariwisata, menyebabkan pemerintah tidak bisa memaksimalkan seluruh potensi pariwisata yang ada. Misalnya promosi objek wisata candi muara takus yang belum maksimal.
3. Beberapa program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tahun 2020 realisasinya masih tidak mencapai target seperti pengembangan destinasi wisata dan meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata.

Diharapkan dengan potensi yang dimiliki oleh candi Muara takus tentunya akan membantu masyarakat, dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Kunjungan Wisata Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Selama Covid-19”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Kunjungan Wisata Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Selama Covid-19 ?
2. Apa Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Kunjungan Wisata Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Selama Covid-19 ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Kunjungan Wisata Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Selama Covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Kunjungan Wsata Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Selama Covid-19.

Kerangka Teori Strategi

Strategi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis dapat mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumberdaya perusahaan dalam jumlah yang besar.

Manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang menaruh pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategi adalah cara dengan jalan para pencari strategi menentukan sarana dan pengambilan keputusan.

Menurut Fred R. David proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap

⁸ M.Liga Suryadana, Vanny Octavia, Pengantar Pemasaran Pariwisata, Alfabeta, Bandung

yaitu: Perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi.⁹

1. Perumusan Strategi
2. Penerapan Strategi
3. Penilaian Strategi

Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁰

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ketempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam.¹¹

Pemerintah Daerah

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat.¹² Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah

dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.

Latar belakang otonomi daerah secara internal, timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibu Kota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibu Kota.

Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan yang sentralistik juga didorong oleh masifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerahdaerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah yang kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Bahkan pernah mencuat adanya dampak negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat local. Inilah yang menginginkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia.¹³

Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi.¹⁴ Rondinelli dalam Mugabi¹⁵ mengartikan desentralisasi

⁹ Fred R. David, *Strategic Management: Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal 6.

¹⁰ UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

¹¹ Drs. H. Oka A. Yoeti, MBA, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: angkasa, 1996, hal, 108

¹² Stephen P. Rob-bins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990. dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 1.

¹³ Hambali, *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015, hlm. 58.

¹⁴ Bhenyamin Hoessein, 2002, "Kebijakan Desentralisasi", *Jurnal Administrasi Negara* Vol. II. No.02. Maret. 2002, hlm. 3.

¹⁵ Rondinelly dalam Edward Mugabi, *Decentralization for Good Governance: Policies, Legal Frameworks and Implementation Strategies*,

sebagai penugasan (*assignment*), pelimpahan (*transfer*), atau pendelegasian tanggung jawab aspek politik, administratif dan keuangan (*fiscal*) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Maddick dalam Hoessein¹⁶ menjelaskan konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan demikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tugas itu.¹⁷

dalam Guido Bertucci, Riccardo Nencini, and Enrico Cecchetti; *Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective Service Delivery*, (Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2004), p. 22. Dikutip dari Rozan Anwar, *Pengembangan Model Administrasi Publik*, Fisip UI, 2009, hlm. 5.

16 Bhenyamin Hoessein, 2002, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No. 1/Vol.1/ Juli/2000, hlm. 10-11.

17 Ateng Syfrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, _____, hlm. 23.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat (Ulber Silalahi, 2010:284). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu menguraikan secara deskriptif data yang diperoleh, selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Kunjungan Wisata Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Selama Covid-19 Tahun 2020-2021

Kawasan Candi Muara Takus yang memiliki ketertarikan, keunikan seperti adanya souvenir, makanan khas dari kawasan Candi Muara Takus, serta cerita rakyat yang pernah terjadi dan keterkaitan dengan budaya Adat Istiadat. sehingga dengan secara tidak langsung akan mengundang wisatawan ke Candi Muara Takus. Namun di lapangan peneliti melihat bahwa informasi tentang objek wisata tidak tersebar kemasyarakat luar.

Selain itu di dalam kegiatan mempromosikan objek wisata kawasan Candi Muara Takus di XIII Koto Kampar mengalami keterbatasan dana. Promosi hanya dapat dilakukan di daerah local dan sekitarnya saja. Partisipasinya masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan pariwisata. Masyarakat diharapkan dapat kut menciptakan suasana Sapta Pesona yaitu tujuh kondisi yang harus diciptakan pada suatu kawasan objek wisata atau daerah tujuan wisata.

Sebagai instansi terkait Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar berupaya untuk melakukan usaha mencari dan melaksanakan kegiatan mulai

dari perencanaan, pembangunan, dan merealisasikannya kelapangan guna memajukan pariwisata di Kabupaten Kampar.

Pemerintah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah memulainya strategi mereka untuk lebih mengembangkan dan memperkenalkan tempat wisata agar bisa di kenal lebuah luas oleh masyarakat dalam daerah maupun luar daerah, dan dari dinas pariwisata dan kebudayaan sudah mulai mempromosikan tempat wisata melalui wedsaid dinas kebudayaan dan pariwsita, dan media sosial lainnya agar lebih banyak lagi yang mengenal objek wisata candi muara takus.

Daya tarik tempat wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Kampar sudah menurun dibandingkan dengan sebelum menyebarnya virus Covid-19. Namun objek wisata tersebut dapat dikatakan belum berkembang secara optimal baik oleh masyarakat sekitar objek pariwisata. Pengelola serta pemerintah setempat.

Sarana prasana yang dapat mendukung objek wisata Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar masih kurang seperti transportasi dari pusat kota menuju objek wisata, tempat penginapan untuk wisatawan dan sarana informasi. Hal tersebut dapat dikatakan masihminimnya fasilitas yang ada di objek wisata Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar, padahal dengan adanya fasilitas yang mendukung dapat membantu pengembangan dalam meningkatkan pendapatan operasional pada objek wisata tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan melalui wawancara yang terdiri dari pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yaitu Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Kepala Seksi Bidang Pariwisata, dan Kepala Desa Muara Takus. Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Kunjungan Wisata Candi Muara Takus Kecamatan

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dapat dilihat dari aspek Perumusan Strategi, Penerapan Strategi, dan Penilaian Strategi. Penjelasan mengenai strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Strategi Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021, Dalam pembangunan kepariwisataan dan Kebudayaan di Kabupaten Kampar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih dihadapkan kepada beberapa persoalan, yaitu :

- 1) Terbatasnya SDM aparatur bidang pariwisata dan Kebudayaan baik kuantitas maupun kualitas.
- 2) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang objek wisata dan aktifitas Kebudayaan.
- 3) Belum lengkapnya dokumen perencanaan dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata, sarana dan prasarana Pariwisata dan Kebudayaan.
- 4) Rendahnya Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati perundang- undangan bidang pariwisata dan kebudayaan sehingga tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.

Persoalan diatas tentu menjadi tantangan bagi pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam membangun pariwisata di Kabupaten Kampar. Salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Kampar adalah Objek Wisata Candi Muara Takus. Dimana objek wisata tersebut juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah agar bisa lebih berkembang dan kunjungan wisatawannya meningkat disetiap tahunnya. Oleh karenanya dibutuhkan suatu strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan pada Objek Wisata Candi Muara Takus.

Terdapat beberapa strategi pengembangan objek wisata candi muara takus dalam meningkatkan jumlah pengunjung di masa pandemi covid-19 sebagai berikut:

Tabel 1 Strategi Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus Tahun 2020

No	Strategi Pengembangan	Indikator	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Pengadaan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi objek wisata candi muara takus Pembangunan akses jalan menuju lokasi objek wisata 	250.000.000	230.000.000	92%
2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sekitar objek wisata Perlibatan masyarakat sebagai aktor pengelola objek wisata 	75.000.000	73.000.000	97,33%
3	Promosi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media sosial Pemasangan baliho objek wisata di kawasan tertentu 	125.000.000	121.800.000	97,44%

Sumber: Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022

Tabel diatas memperlihatkan mengenai strategi pengembangan objek wisata Candi Muara Takus pada tahun 2020 berdasarkan dokumen RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tahun 2017-2022. Dimana terdapat beberapa strategi seperti pengadaan sarana dan prasana, pemberdayaan masyarakat dan promosi pariwisata. Dimana realiasi anggarannya mencapai persentase diatas 90% dari anggaran yang telah dipersiapkan.

Tabel 2 Strategi Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus Tahun 2021

No	Strategi Pengembangan	Indikator	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Meningkatkan daya tarik objek wisata candi muara takus	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perawatan agar tetap terjaga keaslian objek wisata candi muara takus. Menjaga keasrian lingkungan objek wisata candi muara takus. Menumbuhkan semangat masyarakat untuk menjaga kawasan objek wisata candi muara takus. 	170.900.000	157.640.000	92,24%
2	Kemudahan akses	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kejelasan informasi melalui website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar Melakukan pembangunan akses jalan menuju kawasan objek wisata candi muara takus. Menyediakan rambu-rambu jalan yang jelas menuju kawasan objek wisata candi muara takus. 	220.000.000	213.150.000	96,88%
3	Pengadaan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kawasan untuk menjual cendera mata dan kerajinan candi muara takus. Menambah sarana dan prasarana seperti toilet, mushallah, warung, gazebo untuk istirahat, dan fasilitas lain yang dibutuhkan. 	325.000.000	291.811.000	89,78%

Sumber: Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022

Dari tabel diatas dapat dicermati bahwa fokus strategi dalam pengembangan yang terutama adalah kesediaan informasi bagi masyarakat, dan juga perbaikan sarana dan prasarana. Akan tetapi belum 1 pun anggaran yang diberikan bisa terealisasi 100%, walaupun sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Hanya saja belum maksimal pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan di lapangan dapat diketahui bahwa Strategi yang dirumuskan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah terealisasi dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan dilakukannya beberapa strategi seperti meningkatkan daya tarik objek wisata candi muara takus, terdapat kemudahan akses dan pengadaan atau pembangunan fasilitas di kawasan objek wisata candi muara takus yang memberikan kenyamanan bagi setiap pengunjung yang datang.

2. Menerapkan Strategi Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus

Mengenai penerapan strategi pengembangan objek wisata candi muara takus, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan 2021. Strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Strategi Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus Tahun 2020-2021

No	Program	Kegiatan
1	Program Pemasaran Pariwisata	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik didalam dan luar negeri
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kampar
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2021

Berdasarkan tabel 3 diatas mengenai Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2021 dalam upaya pengembangan objek wisata candi muara takus telah ditetapkan beberapa program seperti pemasaran pariwisata, peningkatan destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2021 diatas telah sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022, dimana program-program diatas juga telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan data dari LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tahun 2020 dan 2021, diketahui bahwa pada tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan pada Objek Wisata di Kabupaten Kampar. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	163.332.000	161.432.000	98,84%
		Pelaksanaan promosi nusantara didalam dan diluar negeri	658.366.448	656.916.448	99,78%
		Pelatihan pemandu wisata	23.579.000	23.575.000	99,78%
2	Pengembangan Kemitraan	Pengembangan dan penguatan informasi database	200.000.000	103.700.000	51,85%
		Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	100.000.000	100.000.000	100%
		Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	25.137.500	25.137.500	100%
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	7.107.500	7.107.500	100%
		Monitoring evaluasi dan pelaporan	124.280.000	124.120.000	99,98%
3	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	3.277.861.598	3.060.021.800	93,35%
		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1.287.900.000	1.180.744.000	91,68%
		Pelatihan manajemen homestay/pondok	127.935.000	114.933.000	89,84%
		Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	127.935.000	120.933.000	94,53%

Sumber: LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 5 Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Progran Pemasaran Pariwisata	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik didalam dan luar negeri	565.162.381	562.577381	99,54%
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kampar	2.417.133.166	2.233.690.928	92,41%
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	237.852.759	235.665.759	99,08%
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1.337.886.397	1.321.549.527	98,78%
		Fasilitasi pengembangan komptensi SDM ekonomi kreatif	99.978.000	99.978.000	100%

Sumber: LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4 dan 5 diatas dapat dilihat beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam upayanya mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para informan diatas dapat dipahami bahwa penerapan strategi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudahterlaksana dengan cukup baik, hanya saja belum maksimal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di tempat destinasi wisata sudah cukup memadai dengan baik dan juga sudah ada koordinator penjaga destinasi wisata, walaupun masih belum adanya pos penjagaan dan tempat untuk mencuci tangan yang ada depan pintu masuk tempat wisata untuk mengukur suhu tubuh badan pengunjung yang datang. Walaupun ada juga pengunjung yang tidak mematuhi 3M.

3. Mengevaluasi Strategi Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus

Evaluasi atau penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi harus tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik, Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Penilaian strategi diperlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak perlu berhasil nanti. Keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda, Organisasi yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan. Evaluasi dilakukan agar strategi yang telah diterapkan telah dijalankan sesuai dengan peraturan atau tidak, sehingga nantinya dapat diketahui apa yang telah selesai dan apa yang belum selesai dari strategi yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada tahap penilaian strategi bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih kurang dalam hal mendorong para pihak terkait untuk selalu bekerja sama dalam memajukan tempat wisata candi muara takus dalam penerapan protokol kesehatan karena masih ada pengunjung yang sering tidak mematuhi atau lupa memakai masker.

Sesuai dengan data yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 2017-2022, ditemukan analisis permasalahan kepariwisataan dan kebudayaan serta permasalahan actual berkaitan dengan tugas dan tungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Beberapa permasalahan tersebut antara lain :

1. Pengembangan dan pengelolaan destinasi yang masih belum optimal.

2. Pengembangan dan produktivitas promosi atau promosi yang belum maksimal.
3. Pengembangan industri pariwisata yang belum maksimal dan optimal.
4. Kelembangan dan SDM pariwisata yang belum berstandar dan terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, seharusnya pihak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar melakukan evaluasi yang berangkat dari masalah-masalah diatas. Sehingga dijadikan masukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Kunjungan Wisata Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Selama Covid-19 Tahun 2020-2021

Suatu program yang dicanangkan atau direncanakan oleh pemerintah akan menemukan beberapa faktor dalam pelaksanaan program tersebut. Dimana faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh pada strategi atau program yang akan dilakukan atau dilaksanakan.

Terdapat 4 faktor penghambat dalam Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Kunjungan Wisata Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Selama Covid-19 Tahun 2020-2021. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Siagian¹⁸, bahwsanya dalam setiap penerapan strategi sering menemukan atau menghadapi beberapa hambatan dalam mencapai tujuan dari suatu strategi tertentu. Faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁸ Siagian. P. Sondang, 2008. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 172.

1. Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata itu dalam hal penjagaan dan juga perawatan lingkungan seperti menjaga kebersihan dan kerapian kawasan objek wisata candi muara takus. Kemudian partisipasi masyarakat yang kurang juga terganjal dengan banyaknya kesibukan masyarakat sekitar sehingga tidak memiliki waktu dan kesempatan dalam menjaga kawasan objek wisata candi muara takus. Kurang sadarnya masyarakat dalam partisipasi menjaga lingkungan kawasan objek wisata candi muara takus, ini menyebabkan kawasan candi muara takus menjadi kurang nyaman bagi para pengunjung yang datang.

Selanjutnya berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tahun 2020 ditemukan bahwa yang menjadi ancaman dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kampar adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengolahan objek wisata unggulan.

2. Keterbatasan Anggaran Dalam Pengembangan Pariwisata

Kawasan Candi Muara Takus yang memiliki ketertarikan, keunikan seperti adanya souvenir, makanan khas dari kawasan Candi Muara Takus, serta cerita rakyat yang pernah terjadi dan keterkaitan dengan budaya Adat Istiadat. sehingga dengan secara tidak langsung akan mengundang wisatawan ke Candi Muara Takus.

Namun di lapangan peneliti melihat bahwa informasi tentang objek wisata tidak tersebar kemasyarakat luar. Selain itu di dalam kegiatan mempromosikan objek wisata kawasan Candi Muara Takus di XIII Koto Kampar mengalami keterbatasan dana. Promosi hanya dapat dilakukan di daerah local dan sekitarnya

saja.

3. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Salah satu faktor yang dapat mempercepat pengembangan Objek Wisata adalah fasilitas sarana dan prasarana di tempat wisata. Para wisatawan merasa senang apabila objek wisata yang dikunjungi memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan mendukung. Sarana dan Prasarana yang terdapat di tempat wisata kurang mendapat perawatan yang maksimal oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut juga diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat sekitar maupun wisatawan dalam menjaga fasilitas yang ada. hal ini terjadi karena kultur masyarakat yang dirasa kurang mendukung pengembangan objek wisata, sehingga peran masyarakat kurang dalam sektor pariwisata ini.

Berdasarkan data dari dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2020, disebutkan bahwa dalam menentukan pilihan strategis, untuk mewujudkan Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dilakukan metode SWOT. Dan yang menjadi kelemahan adalah Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan kebudayaan.

4. Kurangnya Minat Investor Untuk Berinvestasi

Pengembangan pariwisata memerlukan adanya kerjasama dengan investor. Mengingat keterbatasan dana dan SDM yang dimiliki, tidak mungkin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dapat bekerja sendiri dalam menangani permasalahan tersebut. Sedangkan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Kampar ini, kurang diminati investor untuk berinvestasi di kawasan objek wisata. Hal tersebut terjadi karena kurangnya peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mencari dan memberikan kemudahan ijin investor luar untuk mengembangkan usahanya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Kunjungan Wisata Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Selama Covid-19 tahun 2020-2021, maka dapat disimpulkan berdasarkan indikator sebagai berikut:

Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam pengembangan objek wisata Candi Muara Takus agar meningkatkan kunjungan wisatawan selama pandemi covid 19, diantaranya membentuk strategi pengembangan objek wisata Candi Muara Takus, menerapkan strategi pengembangan objek wisata Candi Muara Takus, dan mengevaluasi strategi pengembangan strategi pengembangan objek wisata Candi Muara Takus.

Strategi yang dirumuskan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah terealisasi dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan dilakukannya beberapa strategi seperti meningkatkan daya tarik objek wisata candi muara takus, terdapat kemudahan akses dan pengadaan atau pembangunan fasilitas di kawasan objek wisata candi muara takus yang memberikan kenyamanan bagi setiap pengunjung yang datang.

Penerapan strategi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah terlaksana dengan cukup baik, hanya saja belum maksimal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di tempat destinasi wisata sudah cukup memadai dengan baik dan juga sudah ada koordinator penjaga destinasi wisata, walaupun masih belum adanya pos penjagaan dan tempat untuk mencuci tangan yang ada depan pintu masuk tempat wisata untuk mengukur suhu tubuh badan pengunjung yang datang. Walaupun ada juga pengunjung yang tidak mematuhi 3M.

Pada tahap penilaian strategi bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih

kurang dalam hal mendorong para pihak terkait untuk selalu bekerja sama dalam memajukan tempat wisata candi muara takus dalam penerapan protokol kesehatan karena masih ada pengunjung yang sering tidak mematuhi atau lupa memakai masker.

Faktor penghambat strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dan keterbatasan anggaran dalam pengembangan objek wisata candi muara takus, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta kurangnya minat investor untuk berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A. Waskito, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta :Wahyu Media,2016)
- Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan sosial, (Rafika Aditama, Bandung, 2014)
- Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung
- Ateng Syfrudin, Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, Mandar Maju
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001.
- Bagyono, Pariwisata dan Perhotelan (Bandung :Alfabeta, 2014)
- Bhenyamin Hoessein, 2002, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/ Juli/2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Direktorat Jenderal Pariwisata, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, dalam Muljadi A.J Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009

- Drs. H. Oka A. Yoeti, MBA, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: angkasa, 1996
- Fred R David, *Manajemen Strategi*, Edisi ke-10, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal 17.
- H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013
- Hambali, *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015
- Josep Riwu Kaho, *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Aksara Jakarta, 1996
- M.Liga Suryadana, Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, Alfabeta, Bandung
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980
- Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Nurul Qamar, dkk., *Metode Penelitian Hukum : Legal Research Methods*, SIGN, Makassar, 2017
- Odd-Helge Fjeldstad, *Decentralization and Corruption*, (A Review of the literature, Utstein Anti-Corruption Resource Centre, 2003)
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2005)
- Rondinely dalam Edward Mugabi, *Decentralization for Good Governance: Policies, Legal Frameworks and Implementation Strategies*, dalam Guido Bertucci, Riccardo Nencini, and Enrico Cecchetti; *Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective Service Delivery*, (Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2004),p. 22. Dikutip dari Rozan Anwar, *Pengembangan Model Administrasi Publik*, Fisip UI, 2009
- Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012)
- Sondang P. Siagian. *Manajemen Strategik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008
- Stephen P. Rob-bins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990. dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Jurnal**
- Bhenyamin Hoessein, 2002, “Kebijakan Desentralisasi”, *Jurnal Administrasi Negara* Vol. II. No.02. Maret. 2002
- Farida Noor Fitriani, *Pengaruh Training Islamic Excellent Service Terhadap Kinerja Karyawan IAIN Walisongo*, Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, penelitian ini dilakukan oleh Data Wardana, Zainal dan Arwanto Harimas Ginting, Universitas Islam Riau
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten
Kampar
Peraturan Bupati Kabupaten Kampar
Nomor 54 tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kampar
Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2022
Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kampar
Tahun 2020
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kampar